

**PENANGANAN TINDAK PIDANA TERKAIT BAHAN PELEDAK OLEH  
PENYIDIK (STUDI KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA  
JAWA TENGAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

**FERALDI AGUSTINO**

**NIM: 21.C1.0070**

**Kepada  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Tindak pidana yang melibatkan bahan peledak merupakan perbuatan yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, serta keselamatan masyarakat. Penyalahgunaan bahan peledak, termasuk pembuatan dan peredaran petasan ilegal, masih kerap terjadi dan menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Kondisi tersebut menuntut peran aktif aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dalam melakukan penanganan yang profesional dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji proses penanganan tindak pidana terkait bahan peledak serta hambatan yang dihadapi penyidik di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis serta spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta wawancara dengan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh analisis terhadap beberapa laporan kasus tindak pidana bahan peledak yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana bahan peledak telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, mulai dari penerimaan laporan, pengamanan barang bukti, hingga pelimpahan perkara. Dalam proses tersebut, penyidik bekerja sama dengan laboratorium forensik dan satuan terkait untuk memastikan kekuatan pembuktian. Namun demikian, penyidik masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain sulitnya mengungkap dan menangkap pelaku, serta adanya tersangka yang melarikan diri dan berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana bahan peledak di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah berjalan sesuai ketentuan hukum, namun memerlukan penguatan dalam aspek sarana, sumber daya manusia, dan koordinasi antarunit. Disarankan agar kepolisian meningkatkan kemampuan forensik, pelatihan penyidik, serta optimalisasi sistem pengawasan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana bahan peledak.

**Kata Kunci: Penyidikan, Bahan Peledak, Ditreskrimum Polda Jateng, Hambatan Penyidik, Penegakan Hukum.**